

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI NOMOR PER.03/MEN/I/2010 TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2010-2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2010 tanggal 28 Januari 2010, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Tugas dan fungsi Kemnakertrans diarahkan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) prioritas sasaran pembangunan dalam RPJM, yaitu: Pendidikan, Penanggulangan Kemiskinan, Iklim Investasi dan Iklim Usaha, serta Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik. Selain mengakomodasi prioritas pembangunan yang dimuat dalam RPJMN, dokumen Renstra juga memuat tentang kebijakan kementerian dan target sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya, sebagai acuan untuk perencanaan penganggaran tahunan pada saat penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kemnakertrans.

Dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan pada kurun waktu 2010-2011 telah terjadi berbagai perubahan strategis, di lingkup internal terjadinya perubahan struktur organisasi Kemnakertrans sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/2010 yang berimplikasi pada perubahan nomenklatur unit kerja. Unit kerja Eselon I Ditjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) berganti nama menjadi Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT). Selain pada tingkat Eselon I, perubahan juga terjadi pada tingkat direktorat, misalnya Direktorat Fasilitas Perpindahan Transmigrasi berubah nama menjadi Direktorat Fasilitas Penempatan Transmigrasi. Dalam lingkup Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Direktorat Pemberdayaan Pengawasan Ketenagakerjaan berganti nama menjadi Direktorat Bina Penegakan Hukum. Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Direktorat Produktivitas menjadi Direktorat Produktivitas dan Kewirausahaan.

Di samping itu, juga terjadi perubahan kebijakan di bidang ketransmigrasian dengan diterbitkannya UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang secara prinsip mengatur perubahan pendekatan pembangunan ketransmigrasian.

Dalam penerapan sistem penganggaran juga terjadi perubahan yang diberlakukan sejak tahun 2011, di mana setiap unit kerja Eselon I melaksanakan satu program dan capaiannya terletak pada tingkatan *outcome*.

Adapun indikator yang digunakan sebagai pengukur keberhasilan pada level ini adalah Indikator kinerja utama. Sedangkan, unit kerja Eselon II melaksanakan satu kegiatan dengan *output* yang terukur. Dengan kata lain, *outcome* yang dicapai oleh unit kerja Eselon I bergantung pada capaian *output* yang dihasilkan oleh unit kerja Eselon II.

Perubahan strategis eksternal dalam penempatan tenaga kerja ke beberapa negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI), perkembangan dan tuntutan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan juga mempengaruhi kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Dengan adanya perubahan kebijakan di internal-eksternal Kemnakertrans, maka perlu dilakukan *review* terhadap Renstra Kemnakertrans 2010-2014, sebagai upaya menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan mempertajam kembali arah kebijakan, program, kegiatan dan sasaran Kemnakertrans.

Proses penyusunan *review* Renstra ini melibatkan seluruh jajaran unit organisasi Kemnakertrans sehingga penyempurnaannya dapat merupakan representasi dari seluruh unit di lingkungan Kemnakertrans sebab dokumen *review* Renstra ini akan menjadi acuan semua unit jajaran Kemnakertrans dalam merencanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi dalam kurun waktu 2010-2014.

B. Kondisi Umum

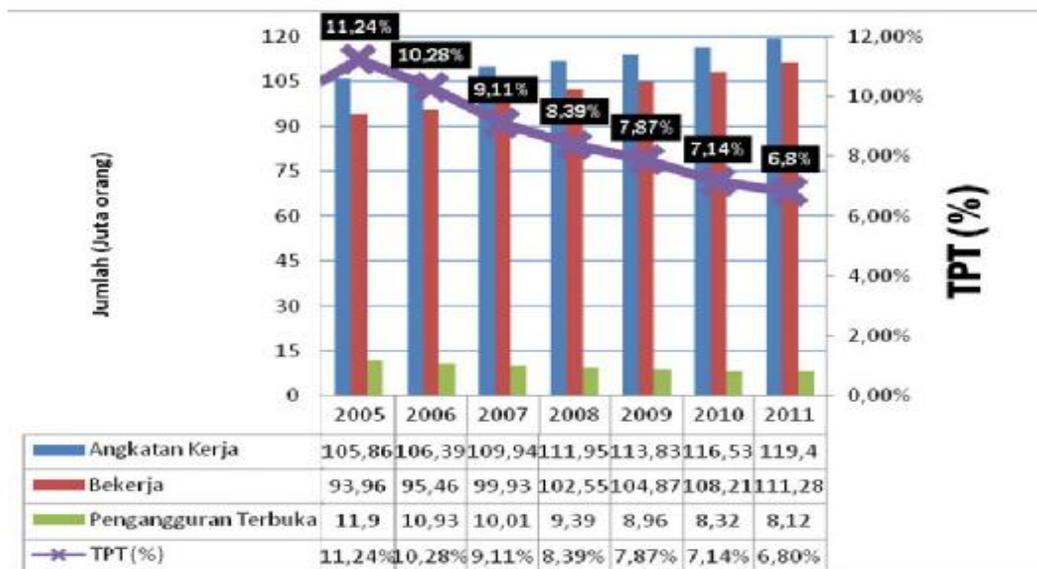
Dalam rangka *review* Renstra Kemnakertrans, maka sesuai peran Kemnakertrans untuk mendukung pengurangan pengangguran dan penurunan kemiskinan harus bertolak dari kondisi umum ketenagakerjaan dan kemiskinan secara nasional.

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang keadaan ketenagakerjaan sampai dengan Februari 2011, jumlah angkatan kerja di Indonesia sejumlah 119,4 juta orang, bertambah sekitar 3,4 juta orang dibandingkan angkatan kerja bulan Februari 2010 sebesar 116,0 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja sebesar 111,3 juta orang,

bertambah 3,9 juta dibandingkan keadaan bulan Februari 2010. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,8 persen atau 8,12 juta orang, mengalami penurunan dibandingkan keadaan bulan Februari 2010 sebesar 7,14 persen atau 8,32 juta orang.

Perkembangan pengangguran di Indonesia sejak tahun 2005 sampai Februari 2011 sebagaimana tergambar dalam grafik I-1.

GRAFIK I-1.
PERKEMBANGAN PENGANGGUR DI INDONESIA



TAHUN 2005 - 2011

Sumber : Sakernas BPS (2011)

Dalam perkembangan satu tahun terakhir (Februari 2010–Februari 2011) hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja, kecuali sektor pertanian dan sektor transportasi, masing-masing mengalami penurunan jumlah pekerja sebesar 360 ribu orang (0,84 persen) dan 240 ribu orang (4,12 persen). Sektor pertanian, perdagangan, jasa masyarakat dan sektor industri secara berurutan menjadi sektor penampung terbesar tenaga kerja.

Berdasarkan tingkat pendidikan, pekerja dengan pendidikan SD ke bawah tetap mendominasi yaitu sebesar 55,1 juta orang (49,53 persen), Sekolah Menengah Pertama 21,22 juta orang (19,07 persen), Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan 26,08 juta (23,44 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan diploma sebesar 3,3 juta orang (2,98 persen)

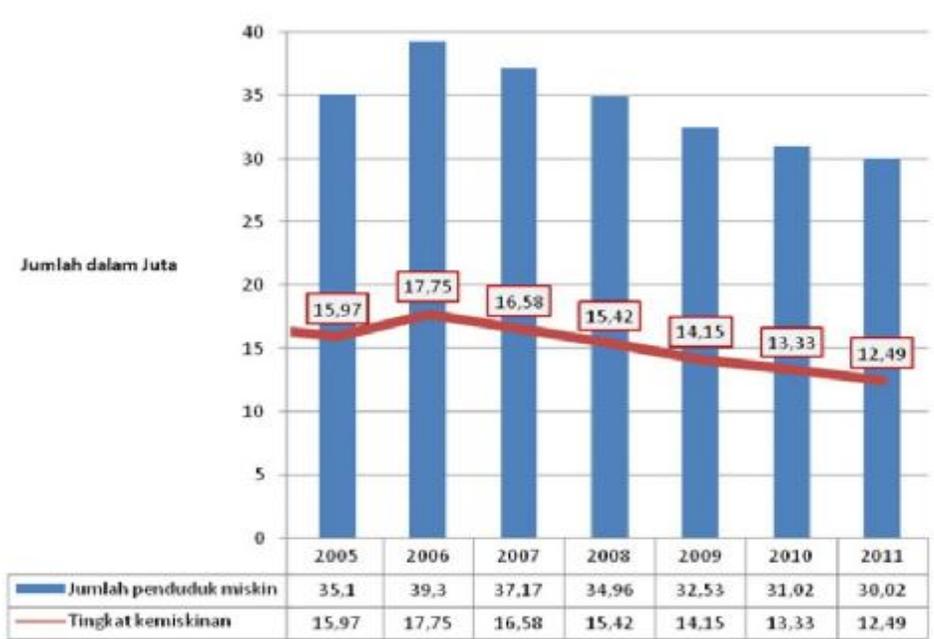
dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 5,5 juta orang (4,98 persen).

Di sisi lain jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), mengalami penurunan sebanyak 1 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Perkembangan dalam satu tahun terakhir persentase penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,05 juta orang, sementara di daerah pedesaan berkurang sekitar 0,95 juta orang.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan pada tahun terakhir jauh lebih besar yaitu 73,52 persen pada bulan Maret 2011 dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan bukan makanan lainnya). Beberapa faktor sebagai penyebab menurunnya persentase penduduk miskin adalah:

1. Cukup rendahnya inflasi umum selama satu tahun terakhir yaitu sebesar 6,65 persen.
 2. Rata-rata upah buruh bangunan naik sebesar 7,14 persen.
 3. Produksi padi naik sekitar 2,4 persen mencapai 68,06 juta ton gabah kering giling.
 4. Perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan melalui nilai tukar petani sebesar 103,32 atau naik 2,09 persen
 5. Tumbuhnya perekonomian Indonesia sebesar 6,5 persen tahun 2010.
- Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2005 sampai Maret 2011 sebagaimana tergambar dalam grafik I-2.

GRAFIK I-2.
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA 2005-2011



Sumber : Sakernas BPS (2011)

Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan secara nasional, Kemnakertrans sebagai salah satu instansi yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, merencanakan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penciptaan kesempatan kerja, pembangunan kawasan, serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar, serta percepatan pembangunan daerah.

Secara lebih spesifik, upaya peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk:

1. Penciptaan kondisi kerja yang layak (*decent work*), dalam pengertian produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai;
2. Penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan merata dalam sektor-sektor pembangunan;
3. Peningkatkan kondisi dan mekanisme hubungan industrial untuk mendorong kesempatan kerja;
4. Penyempurnaan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan melaksanakan peraturan ketenagakerjaan pokok (utama), sesuai hukum internasional;
5. Pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja;
6. Peningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
7. Penciptaan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah;
8. Penyempurnaan kebijakan migrasi;
9. Pengembangan kebijakan pendukung pasar kerja melalui informasi pasar kerja.

Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada:

1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan lainnya;
2. Pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan strategis secara terintegrasi dengan sektor lainnya;
3. Pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada menjadi pusat pertumbuhan atau mendukung pusat pertumbuhan yang ada;
4. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi;
5. Membangun keterkaitan antara kota dan desa di kawasan transmigrasi;
6. Percepatan pembangunan kawasan tertinggal;
7. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan